

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
MAHAKAM ULU NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI

**CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

PENDAHULUAN

TUJUAN

Tujuan kebijakan akuntansi ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

RUANG LINGKUP

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Catatan atas Laporan Keuangan untuk tujuan umum.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum disusun oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tidak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing pengguna laporan keuangan.

Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan laporan keuangan SKPD/PPKD dan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah, tidak termasuk badan usaha milik daerah.

Catatan: Pengguna laporan keuangan meliputi masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak pemberi donasi/bantuan/pinjaman, investor, dan pemerintah yang lebih tinggi.

DEFINISI

Anggaran

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akrua

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis Kas

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

DEFINISI (Lanjutan)

Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Saldo Anggaran Lebih

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/ SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pos

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan secara terpisah dalam laporan keuangan.

Materialitas

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

KETENTUAN UMUM

Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan wajib menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.

Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, CaLK harus menyajikan informasi yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana perlakuan terhadap transaksi atau peristiwa keuangan tertentu dalam laporan keuangan.

Pentingnya Penjelasan Basis dan Kebijakan Akuntansi

Pembaca laporan keuangan tidak semuanya memiliki pemahaman yang memadai mengenai akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, penjelasan mengenai basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat memahami laporan keuangan dengan lebih baik.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan.

STRUKTUR DAN ISI

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi:

- a. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI (Lanjutan)

Penyajian Informasi Umum Entitas

Dalam penyajian informasi umum, CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas tersebut berada;
- Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
- Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.

KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Tujuan Pengungkapan

CaLK harus dapat membantu pembaca memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

Informasi yang perlu diungkapkan antara lain:

- Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan pendapatan;
- Kebijakan efisiensi belanja;
- Penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan.

Indikator Ekonomi Makro

Rencana strategis penyusunan APBD, sasaran, program, dan prioritas anggaran.

Intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan dan retribusi daerah.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan:

- PDRB/Pertumbuhan ekonomi
- Tingkat inflasi
- Nilai tukar
- Harga minyak
- Tingkat suku bunga

Perubahan Anggaran dan Hambatan

CaLK juga harus mengungkapkan perubahan-perubahan atas anggaran yang terjadi selama periode berjalan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah-masalah lainnya yang dianggap perlu oleh penyusun laporan keuangan.

STRUKTUR DAN ISI (Lanjutan)

Penyajian Ikhtisar Pencapaian Target Keuangan Selama Tahun Pelaporan

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan menyajikan informasi mengenai perbandingan antara anggaran dan realisasinya.

Ikhtisar ini mencakup:

- a. Ringkasan realisasi anggaran pendapatan;
- b. Ringkasan realisasi anggaran belanja;
- c. Ringkasan realisasi anggaran pembiayaan;
- d. Penjelasan atas selisih antara anggaran dan realisasi.

Kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan perlu diungkapkan beserta langkah-langkah antisipasi yang diambil oleh entitas.

Analisis atas pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi yang menjelaskan capaian dan penyebab perbedaan yang signifikan antara anggaran dan realisasi.

DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan Akuntansi

CaLK harus mengungkapkan dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang diterapkan, meliputi:

- a. Entitas pelaporan;
- b. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- c. Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- d. Kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan SAP.

Pengungkapan Tambahan

Pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan juga mencakup:

- a. Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- b. Pengakuan belanja dan beban;
- c. Prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- d. Investasi dalam perusahaan asosiasi;
- e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. Kontrak-kontrak konstruksi;
- g. Kebijakan kapitalisasi pengeluaran.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi yang berpengaruh material terhadap tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya harus diungkapkan, meliputi:

- a. Sifat perubahan kebijakan akuntansi;
- b. Alasan dilakukannya perubahan;
- c. Dampak perubahan terhadap pos-pos laporan keuangan;
- d. Penyesuaian yang dilakukan terhadap periode sebelumnya (restatement) jika diperlukan.

Apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi baru belum dapat dilakukan secara retrospektif, maka entitas harus mengungkapkan alasan dan cara penerapan kebijakan akuntansi tersebut.

STRUKTUR DAN ISI (Lanjutan)

Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing-masing pos dalam:

- Laporan Realisasi Anggaran;
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- Neraca;
- Laporan Operasional;
- Laporan Arus Kas;
- Laporan Perubahan Ekuitas.

Penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran disajikan untuk pos-pos Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan dengan struktur: anggaran, realisasi, persentase pencapaian, penjelasan selisih, perbandingan periode lalu, rincian pendapatan, rincian belanja, rincian pembiayaan, dan hal penting lainnya.

Penjelasan Laporan Perubahan SAL

Penjelasan Laporan Perubahan SAL meliputi:

- SAL awal;
- Penggunaan SAL;
- SiLPA/SiKPA tahun berjalan;
- Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- SAL akhir periode.

Penjelasan Laporan Operasional

Penjelasan Laporan Operasional meliputi:

- Pendapatan-LO;
- Beban;
- Perbandingan dengan periode lalu;
- Rincian pendapatan dan beban;
- Penjelasan penting lainnya.

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Arus Kas

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas meliputi: ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir.

Penjelasan Neraca meliputi: aset, kewajiban, dan ekuitas, termasuk rincian aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

Penjelasan Laporan Arus Kas meliputi: aktivitas operasi, aktivitas investasi aset nonkeuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas nonanggaran.

STRUKTUR DAN ISI (Lanjutan)

Pengungkapan Informasi yang Diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi yang Belum Disajikan dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan harus menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan lainnya serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk penyajian wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lain.

Karena keterbatasan asumsi dan metode pengukuran yang digunakan, beberapa transaksi atas peristiwa yang diyakini akan mempunyai dampak penting bagi entitas akuntansi/pelaporan tidak dapat disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan informasi dalam catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi yang tidak mengulang rincian dari yang telah ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

CaLK juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.

CaLK harus mengungkapkan kejadian-kejadian penting selama tahun pelaporan, seperti:

- Penggantian manajemen selama tahun berjalan;
- Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru;
- Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca;
- Penggabungan atau pemekaran entitas tahun berjalan;
- Kejadian yang mempunyai dampak sosial.

Pengungkapan yang diwajibkan dalam tiap kebijakan berlaku sebagai pelengkap kebijakan ini.

Susunan CaLK

CaLK disajikan dengan susunan:

- Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
- Kebijakan akuntansi yang penting;
- Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan;
- Informasi tambahan lainnya yang diperlukan.

Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana terlampir dalam kebijakan akuntansi ini.

Rincian Susunan Kebijakan Akuntansi yang Penting

Kebijakan akuntansi yang penting mencakup:

- Entitas akuntansi/pelaporan;
- Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
- Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan;
- Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan mencakup:

- Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
- Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD**

Bab I	1.1 1.2 1.3	Pendahuluan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	2.1 2.2 2.3	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kebijakan keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	3.1 3.2	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Kebijakan akuntansi Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 5.2.1 5.2.1 5.2.3 5.2.4 5.3 5.1.8 5.4 5.1.9 5.1.10 5.1.11	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD LRA Pendapatan_LRA Belanja LO Pendapatan -LO Beban Kegiatan Non Operasional Pos Luar Biasa Laporan Perubahan Ekuitas Perubahan Ekuitas Neraca Aset Kewajiban Ekuitas
Bab VI		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
Bab VII		Penutup

**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PPKD**

Bab I	1.1	Pendahuluan
	1.2	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan PPKD
	1.3	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan PPKD Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan PPKD
Bab II	2.1	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD PPKD
	2.2	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.3	Kebijakan keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	3.1	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan PPKD
	3.2	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PPKD Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	4.1	Kebijakan akuntansi
	4.2	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah PPKD
	4.3	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.4	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan PPKD
	4.5	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada PPKD Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	5.1	Penjelasan pos-pos laporan keuangan PPKD
	5.1.1	LRA
	5.1.2	Pendapatan-LRA
	5.1.3	Belanja
	5.2	Pembiayaan
	5.1.4	LO
	5.1.5	Pendapatan-LO
	5.1.6	Beban
	5.1.7	Kegiatan Non Operasional
	5.3	Pos Luar Biasa
	5.1.8	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.4	Perubahan Ekuitas
	5.4.1	Neraca
	5.4.2	Aset
	5.4.3	Kewajiban
	5.5	Ekuitas
	5.5.1	Laporan Arus Kas
	5.5.2	Arus Kas dari Operasi
	5.5.3	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
	5.5.4	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan PPKD
Bab VII		Penutup

**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Bab I	1.1	Pendahuluan
	1.2	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
	1.3	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Bab II	2.1	Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
	2.2	Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
	2.3	Kebijakan keuangan Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	3.1	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
	3.2	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	4.1	Kebijakan akuntansi
	4.2	Entitas pelaporan
	4.3	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.4	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
	4.5	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP Kebijakan akuntansi tertentu

**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Bab V	5.1	Penjelasan pos-pos laporan keuangan
	5.1.1	LRA
	5.1.2	Pendapatan-LRA
	5.1.3	Belanja
	5.2	Pembiayaan
	5.2.1	Laporan Perubahan SAL
	5.3	Perubahan SAL
	5.3.1	LO
	5.3.2	Pendapatan-LO
	5.3.2	Beban
	5.3.4	Kegiatan Non Operasional
	5.4	Pos Luar Biasa
	5.4.1	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.5	Perubahan Ekuitas
	5.5.1	Neraca
	5.5.2	Aset
	5.5.3	Kewajiban
	5.6	Ekuitas
	5.6.1	Laporan Arus Kas
	5.6.2	Arus Kas dari Operasi
	5.6.3	Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan
	5.6.4	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
		Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Bab VI		Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan
Bab VII		Penutup